



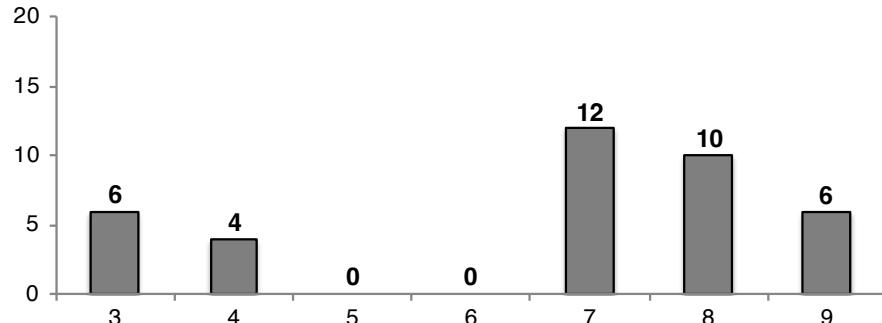
# LAPORAN MEDIA CETAK

**Gubernur Jawa Tengah  
(09 Juli 2025)**

## Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
3	6	6	0	0

## Daily Statistic



## Media Share

-

## Influencers

-

## Table Of Contents : 09 Juli 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	09 Juli 2025	Suara Merdeka	JATMAN Harus Jadi Penjaga Spiritualitas NU	9	Positive	
2	09 Juli 2025	Suara Merdeka	Gubernur Ancam Tindak tegas Penimbun Bahan Pokok	9	Positive	
3	09 Juli 2025	Suara Merdeka	Hari Ini Terakhir Pendaftaran SPMB Tahap II	10	Positive	
4	09 Juli 2025	Suara Merdeka	Pemprov Akan Bangun Jalur Penyelamat di kalijambe	12	Positive	
5	09 Juli 2025	Jateng Pos	Pemprov Siap Kolaborasi BPKP	12	Positive	
6	09 Juli 2025	Rakyat Garut	Stabilkan Harga, Gencar GPM	1	Positive	

<b>Title</b>	<b>JATMAN Harus Jadi Penjaga Spiritualitas NU</b>		
<b>Media</b>	Suara Merdeka	<b>Reporter</b>	sdy-25
<b>Date</b>	2025-07-09	<b>Tone</b>	Positive
<b>Page</b>	9	<b>PR Value</b>	

## JATMAN Harus Jadi Penjaga Spiritualitas NU

PURWOREJO - Rais'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar melantik Pengurus Pusat Idarah Aliyah Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mutab'ahah An-Nahdiyyah (JATMAN) masa khidmah 2025-2030 di Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, Senin (7/7). Acara dihadiri sejumlah tokoh nasional, para pengurus wilayah dan cabang JATMAN dari berbagai daerah, serta para kiai sepuh.

Di antaranya KH Dzikron Abdullah (Rais Mustafad), KH Achmad Chalwani Nawawi (Rais 'Ali), dan Prof KH Ali Masykur Musa (Mudir 'Ali). Nampak juga bersama jamaah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad

Luthfi.

Dalam kesempatan itu, Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa keberadaan JATMAN tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan dinamika perjuangan Nahdlatul Ulama.

Menurutnya, JATMAN bukan hanya organisasi thariqah, tapi juga wadah menjaga kedalam spiritual Islam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Aswaja an-Nahdiyyah.

Ia menyebutkan, JATMAN awalnya bernaama TNU, singkatan dari Thariqah Nahdlatul Ulama, yang didirikan sekitar 1957. Namai itu sempat membuat orang keliru mengira ada kaitan

dengan TNI, karena bunyinya hampir serupa.

"Kalaupun tidak salah tadi Mudir 'Ali menyebut ada yang mengira JATMAN dulunya ada kaitannya dengan TNI. Padahal benar, dulunya namanya TNU (Thariqah Nahdlatul Ulama). Baru menjelang muktamar pertama kali di Semarang tahun 1959, namanya berubah menjadi Jan'iyyah Ahli Thariqah al-Mutab'ahah. Lalu, belakangan ditambahkan An-Nahdiyyah," jelasnya.

Ajaran tarekat itu sendiri jauh lebih tua, lahir bersamaan dengan Islam bahkan bagian dari Islam itu sendiri. Tapi secara jan'iyyah, JATMAN baru lahir pada 1957.

"Maka, tentu usianya lebih muda dari Nahdlatul Ulama yang berdiri pada 1926," ujar pengasuh Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya tersebut. **Jalankan Tarekat**

Kiai Miftach menegaskan, para ulama pendiri NU seperti Hadratussyekh KH Hasyim As'yari juga menjalankan tarekat. Ia bahkan menerima baiat dan talqin dari Syekh Abdul Manan.

"Saya sangat berharap, seluruh pengurus NU itu berthariqah. Bahkan kalau bisa semua warga NU, bukan hanya pengurus, juga bertarekat," harapnya.

Namun demikian, ia mengingatkan agar keterlibatan dalam tarekat tidak mengganggu roda organisasi. Harus ada pembagian peran yang jelas agar NU tetap

berjalan baik, baik secara struktural maupun kultural.

Lebih jauh, ia menyebut NU sebagai miniatur Islam yang utuh, bukan hanya dari aspek akidah, tetapi juga mencakup syariat dan tasawuf. NU menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), sebuah paham akidah yang moderat dan menjaga keseimbangan antara dimensi lahir dan batin.

"NU itu mengikuti apa yang diperintahkan Islam dan meninggalkan apa yang dilarang Islam. Jadi kita tidak membuat pembandingan. Tugas-tugas ini hanya bisa dijalankan dengan struktur yang rapi, dan tentu spiritualitas yang kokoh," tegaskannya.

Kepada para pengurus JATMAN yang dilantik, Kiai Miftach mengapresiasi karena mereka adalah kiai-kiai yang seimbang antara syariat dan hakikat. Mereka adalah sosok yang menjalani *tafaqquh fi al-din* (pendalamkan syariat) dan *tasawuf* (pendalamkan batin/spiritual).

### Kontribusi Ulama

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan, ulama dan tokoh tarekat memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan Jawa Tengah.

Bahkan kalau bisa semua warga NU, bukan hanya pengurus, juga bertarekat," harapnya.

"Hari ini, para ulama berkumpul di Jawa Tengah. Ini menjadi role model yang ikut diikuti oleh wilayah lain," ucapnya. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Luthfi menggambarkan Jawa Tengah sebagai provinsi yang menarik dan potensial, sehingga banyak investor berburu masuk. Ia mencontohkan, sekitar 30 persen investor yang datang ke kantormu berasal dari Tiongkok. "Setiap hari suasana kantor seperti film Kho Ping Ho. Hari ini saya masuk ke ruangan Mbah Yai, rasanya seperti di Arab Saudi karena nuansa keislamananya sangat kuat, bahasa Arab semua," ujarnya.

Dalam aspek pembangunan, Gubernur memaparkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2025 mencapai 4,98 persen, di atas rata-rata nasional. Sementara itu, nilai investasi yang masuk telah menembus Rp21,5 triliun.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pendidikan Islam dan pesantren.

"Kami sudah alokasikan Rp 58,7 miliar untuk pendidikan Islam. Bahkan pada triwulan I 2025, kami geser anggaran menjadi Rp 220 miliar untuk kegiatan kelembagaan dan para pendidik Islam," ungkapnya. (sdy-25)



**KALUNGKAN SLAYER:** Didampingi Rais 'Ali JATMAN KH Achmad Chalwani Nawawi, Mudir 'Ali Prof KH Ali Masykur Musa mengalungkan slayer kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat pelantikan PP JATMAN masa khidmah 2025-2030 di Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, Senin (7/7). (25)

<b>Title</b>	<b>Gubernur Ancam Tindak tegas Penimbun Bahan Pokok</b>		
<b>Media</b>	Suara Merdeka	<b>Reporter</b>	ekd-25
<b>Date</b>	2025-07-09	<b>Tone</b>	Positive
<b>Page</b>	9	<b>PR Value</b>	

## Gubernur Ancam Tindak Tegas Penimbun Bahan Pokok

**SEMARANG** - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memerintahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Polda Jateng untuk terus memantau ketersediaan bahan pokok penting masyarakat.

Dia meminta jangan sampai ada pihak yang main-main dengan menimbun kebutuhan pokok masyarakat. "Satgas Pangan Provinsi sudah kerja sama dengan Polda. Saya imbau masyarakat jangan coba-coba menimbun bahan pokok karena itu nanti bisa terkena sanksi terkait pidana," ujarnya, Selasa (8/7).

Luthfi menjelaskan, tindakan penimbunan sudah jelas dilarang oleh undang-undang. Operasi-operasi akan dilakukan oleh Satgas Pangan Provinsi bekerja sama dengan Satgas Pangan Polda Jateng.

"Penimbunan kan dilarang. Nanti akan kami lakukan operasi-operasi dari satgas pangan kita dengan Polda, serta penetrasi dari beberapa instruksi terkait bahan pokok penting," tegasnya.

Satgas Pangan tersebut sudah jalan mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Tugasnya adalah melakukan pengamatan, pendataan, dan kalau perlu melakukan penindakan.

Apabila ada pihak yang diketahui menimbun kebutuhan pokok masyarakat, maka penindakan akan diserahkan kepada kepolisian.

"Kalau sudah penindakan itu ranahnya kepolisian. Nanti koordinasi dengan ditreskimsus, inteljen dan lain sebagainya untuk operasi bahan pokok penting bagi mereka yang mencoba menimbun," tegasnya.

Sementara itu, Pemprov Jateng menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di sebelas kabupaten/kota. Gerakan tersebut untuk merespons kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok penting seperti beras dan minyak goreng. (ekd-25)

<b>Title</b>	<b>Hari Ini Terakhir Pendaftaran SPMB Tahap II</b>		
<b>Media</b>	Suara Merdeka	<b>Reporter</b>	ekd-88
<b>Date</b>	2025-07-09	<b>Tone</b>	Positive
<b>Page</b>	10	<b>PR Value</b>	



**BUKA PENDAFTARAN :** Sekolah SMK Ibu Kartini Kota Semarang membuka pendaftaran SPMB Tahap II untuk kuota afirmasi, Selasa (8/7). (88)

# Hari Ini Terakhir Pendaftaran SPMB Tahap II

■ Program Gubernur Sudah Serap 2.238 Siswa Miskin

**SEMARANG** - Rabu 9 Juli 2025 menjadi kesempatan terakhir masyarakat yang ingin mendaftar di SPMB Tahap II. Pendaftaran sekolah swasta gratis yang dicetuskan Gubernur Ahmad Luthfi ini akan dibuka hingga pukul 17.00.

SPMB Tahap II ini lanjutan dari SPMB pertama. Pemprov Jateng masih memberikan kesempatan bagi siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah untuk segera mendaftar.

Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Jateng, Kustrisaptono, menjelaskan, dari 139 sekolah yang menjalin kemitraan dengan Pemprov Jateng di program SPMB ini, kuota di 14 sekolah sudah penuh. Masing-masing 36 siswa. Namun, calon siswa bisa mendaftar di sekolah-sekolah lain-

nya dengan jumlah kuota bisa bervariasi. Menurutnya, pada SPMB tahap pertama lalu, ada 1.913 siswa dengan kategori afirmasi atau dari keluarga kurang mampu.

"Hingga Selasa (8/7) pukul 11.50, kuotamash 3.089 kursi. Dalam dua hari di SPMB Tahap II ini sudah ada 325 siswa yang mendaftar," kata Kustrisaptono.

Artinya sampai hari kemarin sudah ada 2.238 siswa yang terdaftar di SPMB Tahap II. Meski yang terserap masih

kurang dari setengah, namun itu bukan menjadi patokan berhasil atau tidaknya program ini. Kenyataannya, sudah ada 70 ribu siswa afirmasi yang masuk di SPMB sekolah negeri tahun 2025.

Sisanya, masih ada sekitar 7 ribu siswa afirmasi yang terdaftar di database. Sama ini sebagian terserap di SPMB kemitraan Tahap II dan sebagian lainnya sekolah di sekolah swasta lain.

"SPMB Tahap II ini dibuka, ayo segera mendaftar bagi siswa yang belum mendaftar di sekolah swasta lain (tak masuk kemitraan pemprov). Kalau sudah mendaftar di sekolah swasta lain, jangan ditiruk ke (sekolah) swasta kemitraan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Ibu Kartini Kota Semarang, Muhdlor, mengatakan, sekolah yang ia pimpin menjadi mitra pemerintah di program SPMB tahun ini memiliki kuota 36 kursi. Ada 11 orang siswa yang

bermendaftar di SPMB tahap pertama. Namun dari jumlah itu, 7 yang melakukan daftar ulang. Sebagian siswa mundur karena lokasi rumah dan sekolah yang dirasa terlalu jauh.

Pihak sekolah merasa diuntungkan dengan adanya program ini. Pertama, menjadi mitra pemerintah menjadikan sekolah semakin dikenal masyarakat. Kedua, adanya alokasi anggaran bagi siswa afirmasi menjadikan sekolah lebih bisa berbuat banyak untuk mencerdaskan generasi muda.

"Kita jemput bola. Siswa yang berasal dari wilayah (Kecamatan) Gajahmungkur Kota Semarang kita laek dan hubungi. Kalau sudah daftar di sekolah lain ya silakan, tapi kalau belum maka kita ajak mendaftar di sini," ungkapnya.

Di SPMB Tahap II ini, SMK Ibu Kartini per Selasa kemarin sudah mendapatkan 3 siswa tambahan. Mereka akan bergabung dengan 7 siswa sebelumnya dan akan mendapatkan pendidikan secara gratis. (ekd-88)

Title	<b>Pemprov Akan Bangun Jalur Penyelamat di Kalijambe</b>		
Media	Suara Merdeka	Reporter	fid-26
Date	2025-07-09	Tone	Positive
Page	12	PR Value	

# Pemprov Akan Bangun Jalur Penyelamat di Kalijambe

**PURWOREJO** - Rencana akan dibangunnya jalur penyelamat di tanjakan maut Kalijambe, Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, pada tahun anggaran 2025 ini mendapat kejelasan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan membangun jalur penyelamat di tanjakan maut Kalijambe, Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, pada tahun anggaran 2025 ini.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Yuli Hastuti usai mendampingi Gubernur Ahmad Luthfi dalam agenda peninjauan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Halaman Kantor Kecamatan Bener, Senin (7/7).

"Alhamdulillah, saat ramah tamah di rumah dinas tadi, Pak Gubernur menyampaikan secara langsung soal pembangunan jalur penyelamat di Kalijambe," ungkap Bupati Yuli,

didampingi Wakil Bupati Dion Agus Setiabudi.

Bupati menjelaskan, Pemkab Purworejo sudah lama mengusulkan pembangunan jalur penyelamat tersebut ke Pemprov. Bahkan ia sendiri sempat melaporkannya langsung kepada Gubernur Luthfi saat berkunjung ke Semarang beberapa waktu lalu.

Jalur penyelamat Kalijambe menjadi kebutuhan mendesak mengingat medan tanjakan yang sangat curam dan kerap menjadi lokasi kecelakaan fatal. Tak heran, kawasan ini sering dijuluki warga sebagai "jalur tengkorak" karena memakan banyak korban jiwa dan kerugian materi.

Langkah cepat Pemprov Jateng bersama Pemkab Purworejo ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata demi keselamatan pengguna jalan dan mengurangi risiko kecelakaan di salah satu titik rawan di jalur Purworejo-

Magelang tersebut.

"Pembangunan ini akan dilakukan melalui perubahan anggaran tahun 2025. Semoga nanti berjalan lancar, dan bisa segera dimanfaatkan masyarakat," harapnya.(fid-26)



SM/Hafidz Kurnia

**FOTO BERSAMA :** Bupati Yuli Hastuti saat foto bersama dengan Gubernur Ahmad Luthfi usai peninjauan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Bener, Senin (7/7). (26)

Title	Pemprov Siap Kolaborasi BPKP		
Media	Jateng Pos	Reporter	ucl
Date	2025-07-09	Tone	Positive
Page	12	PR Value	

12



Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama Buyung Wiromo Samudro, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah.

HUMASJATENGPOS

# Pemprov Siap Kolaborasi BPKP

## Ciptakan Jawa Tengah Clear dan Good Government

SEMARANG Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengukuhkan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Pengukuhan dilakukan di Gardhika Bhakti Praja, Selasa, 8 Juli 2025.

"Saya Gubernur Jawa Tengah dengan ini resmi mengukuhkan saudara Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebaiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," kata Luthfi saat pengukuhan.

Buyung Wiromo Samudro sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur di BPKP Pusat. Buyung ditunjuk menggantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebelumnya, Tri Handoyo,

yang memasuki masa pensiun pada bulan Mei 2025.

Luthfi berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang baru dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemprov Jateng serta instansi lainnya di Jawa Tengah. Tentu saja dalam rangka fungsi pembinaan, pengawasan, serta operasional kegiatan pembangunan di Jawa Tengah. Tujuannya untuk menciptakan Jawa Tengah clear and good government secara maksimal.

"Saya yakin dan percaya Pak Buyung bisa segera kolaborasi

dengan kita. Banyak hal yang akan kita kolaborasikan," ujarnya.

Bebberapa hal yang akan dikolaborasikan adalah terkait program-program prioritas Provinsi Jawa Tengah. Bekerja sama dengan APIP dan penegak hukum lainnya, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan melakukan fungsi pengawasan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan monitoring program. "Ini harus kita kedekopankan sehingga roadmap Jawa Tengah bisa lebih bagus dan berkesinambungan," jelas Luthfi.

Selain itu, kolaborasi pengawasan

juga akan dilakukan terkait dengan program strategis nasional (PSN) yang ada di Jawa Tengah serta bantuan keuangan untuk pemerintah desa, baik dari desa dari pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

Menurut Luthfi, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi untuk mendukung PSN. Di Jawa Tengah sendiri banyak sekali PSN meliputi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Kendal (KIK), proyek giant sea wall, jalan tol, bendungan, dan



AHMAD LUTHFI  
(Gubernur Jateng)

sebagainya. "Kegiatan PSN jadi prioritas pertama," ujarnya.

Prioritas berikutnya adalah tentang pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan dan dana desa. Bagi Luthfi, desa merupakan basis pembangunan daerah. Saat ini ada rentang jarak yang cukup jauh antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota ke pemerintah desa. Maka dari itu program kecamatan berdaya dijadikan solusi untuk menjangkau desa-desa.

Sejauh ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengucurkan

bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang jumlahnya tidak sedikit. Begitu juga dengan kuriran dana desa dari pemerintah pusat yang total mencapai triliunan rupiah. Untuk itu pengawasan terkait perencanaan dan pelaksanaan dana desa menjadi hal utama sehingga tidak terjadi penyelewengan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Semua, baik dana desa maupun bankeu pada pemdes. Itu nanti akan dikawal oleh BPKP, termasuk unsur lain sehingga kita betul-betul rule of law sesuai dengan kepentingan yang kita lakukan," tegaskan Luthfi.

Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setyo Nugroho. Menurutnya, tantangan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) saat ini tidak mudah. Mulai dari peningkatan pendapatan, perencanaan pembangunan, dan lainnya.

Untuk itu BPKP memfokuskan pada tiga hal strategis. Pertama, pengawalan dan pengawasan barang jasa dan PAD. Ada laporan dari BPK sekitar 80 persen kasus yang

ditangani terkait dengan pengadaan barang dan jasa; Kedua, efektivitas hasil dari kinerja pemerintah daerah dan desa, fokusnya adalah Pemda dan pemdes dapat mencapai hasil yang dirasakan masyarakat dengan pengawasan perencanaan penganggaran dan program pusat yang ada di daerah; Ketiga, tata kelola terkait dengan manajemen risiko pembangunan.

"BPKP Jawa Tengah hadir juga untuk mengawal program-program prioritas Gubernur Jawa Tengah, kalau tidak salah ada 11 program," katanya.

Ia menyampaikan, pada intinya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang baru siap berkolaborasi dengan Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran serta instansi vertikal. Termasuk kolaborasi dengan akademisi dan perguruan tinggi.

"Kita mengawal seluruh program prioritas yang memang created dari Gubernur sendiri untuk memajukan Jawa Tengah yang tercinta, termasuk PSN yang ada di Jawa Tengah. Itu kami kawal, kami tidak sendirian, kami kolaborasi dan sinergi," ujarnya. (\*/ucl)

<b>Title</b>	<b>Stabilkan Harga, Gencar GPM</b>		
<b>Media</b>	Rakyat Garut	<b>Reporter</b>	jpc
<b>Date</b>	2025-07-09	<b>Tone</b>	Positive
<b>Page</b>	1	<b>PR Value</b>	



TINJAU. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7/2025).

## Stabilkan Harga, Gencar GPM

RADSIK – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjajal pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7/2025).

Gencarnya tersebut merupakan bentuk intervensi Pemprov Jateng untuk merespons kebutuhan harga beberapa bahan pokok, akhirnya meningkatnya keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Selain Purworejo, kegiatan serupa juga digelar di sejumlah kabupaten/kota lainnya. Khususnya di daerah yang harga komoditas beras dan minyak gorengnya terpantau tinggi.

"Tahap awal ini digelar di sebelas kabupaten/kota, kerja sama dengan JTAB, Bulog, dengan Muspida," kata Luthfi.

Kegiatan ini, lanjut dia, untuk melakukan penetrasi harga agar tidak terjadi kelangkaan dan fluktuasi harga yang terlalu tinggi di masyarakat. Sebal, tinggi harga pokok bisa berpotensi mempengaruhi inflasi.

Intervensi yang dilakukan Pemprov Jateng dalam kegiatan tersebut berupa subsidi harga bahan pokok dengan nilai total Rp 40 juta dan perkiraan onzet sebesar Rp 300 juta.

GPM ini dilaksanakan dengan melibatkan para pelaku usaha pangan (BUMN, BUMD, gepoktan/potkan/pelaku usaha pangan lainnya) sehingga mendapatkan harga dasar dan memotong panjangnya rantai distribusi untuk sampai tangan konsumen.

Komoditas yang dijual dalam GPM antara lain beras sebanyak 10 ton, harga normal Rp 13.500/kg, disubsidi Rp 2.500/kg menjadi Rp 11.000/kg; minyak goreng 2.000 liter, harga normal Rp 18.000/liter, disubsidi Rp 4.000/liter, menjadi Rp 14.000/liter; telur ayam ras 1 ton, harga normal Rp 28.000/kg, disubsidi dengan harga Rp 24.000/kg.

Kemudian ada gula pasir 500 kg, harga normal Rp 17.500/kg, disubsidi dengan harga Rp 15.000/kg; bawang putih 250 kg, harga normal Rp 36.000/kg,

kg, disubsidi dengan harga Rp 28.000/kg; bawang merah, harga normal Rp 50.000/kg, disubsidi dengan harga Rp 40.000/kg; dan cabai rawit merah, harga normal Rp 40.000/kg, disubsidi dengan harga Rp 30.000/kg.

"Kegiatan ini memberikan bantuan pokok kepada masyarakat dalam rangka penetrasi harga agar terjangkau oleh masyarakat, kemudian inflasi kita bisa dijaga," jelas Ahmad Luthfi didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari dan Bupati Purworejo.

Menurut Luthfi, kenaikan harga beras yang ada di beberapa daerah akan ditindaklanjuti segera bersama dengan Bulog. Apalagi saat ini sudah masuk musim panen, penetrasi akan dilakukan agar tidak terjadi kenaikan harga yang tinggi.

"Kenaikan harga kebutuhan pokok dipengaruhi oleh beberapa hal, saat ini juga musim anak masuk sekolah, kebutuhan meningkat dan sebagainya, sehingga negara harus hadir dalam rangka penetrasi harga," jelasnya.

Melihat antusiasme masyarakat yang terlibat dalam GPM, Luthfi mengajak masyarakat kepada dinas dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kegiatan GPM akan dijadikan role model penetrasi harga.

"(Masyarakat) ramai sekali.

Dari pagi ramai sekali, lihat saja. Ini menjadi role model untuk kita gerakkan di sebelas kabupaten/kota, tidak hanya Purworejo," pungkasnya.

Salah seorang warga, Estimah, mengaku senang dengan adanya Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan oleh Pemprov Jateng. Di sana ia dapat membeli bahan pokok dengan harga yang lebih murah dari harga di pasar.

"Ini beli beras, minyak goreng, dan telur. Harganya miring sedikit dibanding di luar. Senang karena harga di luar mahal. Beras di luar Rp 14 ribu, ini 5 kg Rp 55 ribu, beli 10 kg tadi," ujar warga asal Desa Kaluirip Purworejo itu. (jpc)